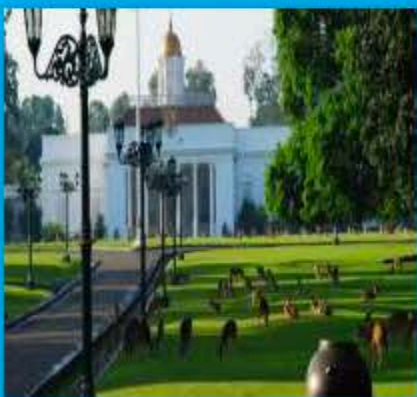


KATALOG BPS : 9203.3271

Produk Domestik Regional Bruto *Kota Bogor*

Menurut Lapangan Usaha 2012 - 2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BOGOR
TAHUN 2017**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA BOGOR MENURUT LAPANGAN USAHA
TAHUN 2012 - 2016**

ISSN :
Nomor Publikasi :
Katalog BPS : 9203.3271
Ukuran Buku : 21.59 cm x 27.94 cm
Jumlah Halaman : viii + 75

Naskah :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kota Bogor,

Gambar Kulit :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh : Badan Pusat Statistik Kota Bogor

Dicetak oleh : Badan Pusat Statistik Kota Bogor

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang atas perkenanNya sehingga publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor Menurut Lapangan Usaha tahun 2012 - 2016 dapat terbit.

Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 ini menggunakan Harga Tahun Dasar 2010 serta pengkategorian baru menjadi 17 Kategori Sektor Perekonomian. Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Kota Bogor secara deskriptif dalam bentuk tabel dan grafik analisis baik secara makro maupun mikro.

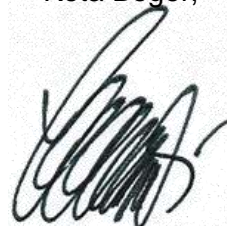
Pergeseran tahun dasar dari tahun 2000 ke tahun 2010 secara umum dimaksudkan untuk mengakomodir pergeseran struktur perekonomian yang terjadi selama 10 tahun. Kecuali itu, pergeseran tahun dasar yang dilakukan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas PDRB serta untuk memenuhi tuntutan Internasional sehingga data yang disajikan dapat diperbandingkan.

Demi penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan data statistik ekonomi, kami mengharapkan saran dan kritik untuk penyempurnaannya.

Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada pembaca.

Bogor, Agustus 2017

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Bogor,



Budi Hardiyono, S.Si, ME
NIP. 19660925 198802 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	vi
PENJELASAN TEKNIS	vii
I PENJELASAN UMUM	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto	1
1.2 Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto	2
1.3 Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto	2
II RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN	8
2.1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8
2.2. Pertambangan dan Penggalian	13
2.3. Industri Pengolahan	15
2.4. Pengadaan Listrik dan Gas	20
2.5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	23
2.6. Konstruksi	23
2.7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25
2.8. Transportasi dan Pergudangan	26
2.9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	30
2.10. Informasi dan Komunikasi	31
2.11. Jasa Keuangan dan Asuransi	33
2.12. Real Estat	40
2.13. Jasa Perusahaan	41
2.14. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	43
2.15. Jasa Pendidikan	43
2.16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	44
2.17. Jasa Lainnya	44

III	TINJAUAN EKONOMI KOTA BOGOR	47
	3.1. Struktur Ekonomi	47
	3.2. Pertumbuhan Ekonomi	49
	3.3. PDRB Perkapita	50
IV	PERKEMBANGAN PDRB KOTA BOGOR MENURUT LAPANGAN	
	USAHA	51
	4.1. Pertanian dan Perikanan	51
	4.2. Pertambangan dan Penggalian	53
	4.3. Industri Pengolahan	53
	4.4. Pengadaan Listrik dan Gas	55
	4.5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	55
	4.6. Konstruksi	56
	4.7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	57
	4.8. Transportasi dan Pergudangan	58
	4.9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	59
	4.10. Informasi dan Komunikasi	59
	4.11. Jasa Keuangan dan Asuransi	60
	4.12. Real Estat	61
	4.13. Jasa Perusahaan	62
	4.14. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	62
	4.15. Jasa Pendidikan	63
	4.16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	64
	4.17. Jasa Lainnya	64
	Lampiran.....	66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 LPE Kota Bogor Tahun 2012 – 2016 (%).....	50
Gambar 3.2 Laju PDRB Per Kapita Kota Bogro 2011-2016 (Persen).....	51
Gambar 4.1 Laju Pertumbuhan Laporan Usaha Kategori A di Kota Bogor 2012 – 2016 (Persen)	52
Gambar 4.2 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Kategori Industri Pengolahan di Kota Bogor 2012 – 2016 (Persen)	54
Gambar 4.3 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Kategori Pengadaan Listrik dan Gas di Kota Bogor 2012 – 2016 (Persen)	55
Gambar 4.4 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Kategori E di Kota Bogor 2012 – 2016 (Persen)	56
Gambar 4.5 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Kategori Kontruksi di Kota Bogor 2012 – 2016 (Persen).....	56
Gambar 4.6 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Kategori G di Kota Bogor 2012 – 2016 (Persen)	57
Gambar 4.7 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Kategori Transportasi dan Pergudangan di Kota Bogor 2012 – 2016 (Persen)	58
Gambar 4.8 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Kategori Akomodasi dan Makan Minum di Kota Bogor 2012 – 2016 (Persen)	59
Gambar 4.9 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Kategori Informasi dan Komunikasi di Kota Bogor 2012 – 2016 (Persen)	60
Gambar 4.10 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Kategori Real Estate di Kota Bogor 2012 – 2016 (Persen)	61
Gambar 4.11 Laju Pertumbuhan Lapangan Jasa Perusahaan di Kota Bogor 2012 – 2016 (Persen)	61
Gambar 4.12 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Kategori Jasa Perusahaan di Kota Bogor 2012 – 2016 (Persen)	62
Gambar 4.13 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib di Kota Bogor 2012 – 2016 (Persen)	63
Gambar 4.14 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Kategori Jasa Pendidikan di Kota Bogor 2012 – 2016 (Persen)	63
Gambar 4.15 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial di Kota Bogor 2012 – 2016 (Persen)	64

Gambar 4.16 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Kategori Jasa Lainnya di Kota Bogor 2012 – 2016 (Persen)	65
--	----

<http://www.bogorkota.go.id>

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB.....	5
Tabel 1.2	Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010.....	6
Tabel 1.3.	Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010.....	7
Tabel 3.1	Nilai PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah).....	48
Tabel 3.2	Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor Tahun 2012-2016 (Persen)	49
Tabel 3.3	PDRB Per Kapita di Kota Bogor 2011–2016**.....	51

PENJELASAN TEKNIS

1. Penghitungan statistik neraca nasional yang digunakan di sini mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa yang dikenal sebagai “Sistem Neraca Nasional”. Namun, penerapan statistik neraca nasional tersebut telah disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.
3. Penyajian PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.
4. Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi di sini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.
5. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.
6. **Harga Berlaku** adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan.

7. Harga Konstan adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar.

8. Tahun Dasar adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator rinci mengenai perubahan/pergerakan yang terjadi.

<http://bea.kota.bps.go.id>

I. PENJELASAN UMUM

1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar pijakan dalam penentuan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Arah dari pembangunan ekonomi hendaknya mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional serta berkala yang digunakan untuk bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya dibidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Apa yang dimaksud dengan PDRB?

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat

struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

1.2 Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto

Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk.
5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu Negara.

1.3 Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto

Selama sepuluh tahun terakhir, perubahan yang terjadi pada tatanan perekonomian global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan system pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa Bangsa

(PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota/Kabupaten untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Apa yang dimaksud SNA 2008?

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur *item* tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi, dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain:

- Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDRB;
- Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Apakah Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- Perekonomian Indonesia Tahun 2010 relatif stabil;
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun¹;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index/PPI*);
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDRB tahun dasar 2010 diantaranya:

- **Konsep dan Cakupan: Perlakuan *Work-in Progress (WIP)* pada *Cultivated Biological Resource (CBR)*:**

Merupakan penyetaraan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum dipanen sebagai bagian dari *output* lapangan usaha yang bersangkutan seperti: nilai tegakan padi yang belum dipanen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan, nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.

¹ SNA 1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- **Metodologi:** Perbaiki metode penghitungan *ouput bank* dari *Imputed Bank Service Charge (IBSC)* menjadi *Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM)*
- **Valuasi:** Nilai tambah lapangan usaha dinilai dengan **Harga Dasar (*Basic Price*)**. Merupakan harga keekonomian barang dan jasa ditingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk. Valuasi ini hanya untuk perhitungan PDB, sedangkan PDRB menggunakan harga produsen.
- **Klasifikasi:**
Klasifikasi yang digunakan berdasarkan *Internasional Standard Classification (ISIC rev.4)* dan *Central Product Classification (CPC rev.2)*. BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLI 2009) dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia 2010 (KBKI 2010).

Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA sebelumnya dan SNA 2008 antara lain dijelaskan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB

Variabel	Konsep Lama	Konsep Baru
1. Output pertanian	Hanya mencakup output pada saat panen	Output saat panen ditambah nilai hewan dan tumbuhan yang belum menghasilkan
2. Metode penghitungan output bank komersial	Menggunakan metode <i>Imputed Bank Services Charge (IBSC)</i>	Menggunakan metode <i>Financial Intermediary Services Indirectly Measured (FISIM)</i>
3. Biaya eksplorasi mineral pembuatan produk original	Dicatat sebagai konsumsi antara	Dicatat sebagai <i>output</i> dan dikapitalisasi sebagai PMTB

Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000 ke PDRB Tahun Dasar 2010

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI 2009. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2. Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian	B. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan	C. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	D. Pengadaan Listrik dan Gas
	E. Pengadaan Air
5. Konstruksi	F. Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
7. Pengangkutan dan Komunikasi	H. Transportasi dan Pergudangan
	I. Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum
8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan	J. Informasi dan Komunikasi
	K. Jasa Keuangan
	L. Jasa Keuangan
	M, N. Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
	P. Jasa Pendidikan
	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	R, S, T, U. Jasa Lainnya

Sementara klasifikasi PDRB menurut pengeluaran tahun dasar 2010 secara garis besar tidak banyak mengalami perubahan seperti tabel berikut:

Tabel 1.3. Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

II. RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN

Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing kategori dan subkategori lapangan usaha, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya.

2.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala perusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Perusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

2.1.1 Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian

Subkategori ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual.

2.1.1.1 Tanaman Pangan

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dll), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll). Keseluruhan komoditas diatas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.

Data produksi padi dan palawija diperoleh dari Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Pedesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok

tanaman pangan dari Subdit Statistik Harga Pedesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman pangan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS.

2.1.1.2 Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman. Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok komoditi sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias.

Data produksi komoditas hortikultura diperoleh dari Subdit Statistik Hortikultura BPS. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Pedesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman hortikultura dari Subdit Statistik harga Pedesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman hortikultura diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

2.1.1.3 Tanaman Perkebunan

Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Data produksi komoditas perkebunan diperoleh dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Pedesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman perkebunan dari Subdit Statistik Harga Pedesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman perkebunan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

2.1.1.4 Peternakan

Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Golongan ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dsb.

Data produksi peternakan diperoleh dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Pedesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok peternakan dari Subdit Statistik Harga Pedesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan peternakan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Peternakan (Ternak Besar dan Kecil, Ternak Unggas, dan Sapi Perah) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Peternakan BPS.

2.1.1.5 Jasa Pertanian dan Perburuan

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan). Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.

Kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari furskin, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkap untuk umum penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan, produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan

atau penangkapan. Sedangkan kegiatan penangkaran satwa liar mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian satwa liar, baik satwa liar darat dan satwa liar laut seperti mamalia laut, misalnya duyung, singa laut dan anjing laut.

Output jasa pertanian diperoleh dari pendekatan imputasi dengan memperhatikan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan pertanian pada periode tertentu. Output kegiatan pertanian diperoleh dari Subdit Neraca Barang BPS. Sedangkan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani, dan Survei Perusahaan Peternakan yang dilakukan BPS. Sedangkan untuk kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar diestimasi menggunakan pendapatan devisa dari penjualan satwa liar yang datanya diperoleh dari Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.1.2 Kehutanan dan Penebangan Kayu

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk disini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Data produksi kayu bulat dan hasil hutan lainnya berasal dari Perum Perhutani, Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Subdit Statistik Kehutanan BPS. Data harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Kehutanan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan kehutanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Kehutanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Kehutanan BPS.

2.1.3 Perikanan

Subdirektori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biotan air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun

di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi semua jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Data produksi komoditas perikanan diperoleh dari Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Pedesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok perikanan dari Subdit Statistik Harga Pedesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan perikanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Perikanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Perikanan BPS.

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian.

Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis, yaitu output utama dan output ikutan. Disamping itu, komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Perhitungan *output* pada kategori ini tidak hanya mencakup output utama dan ikutan pada saat panen tetapi juga ditambahkan output yang diadopsi dari implementasi SNA 2008. Untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan *Cultivated Biological Resources* (CBR). Sedangkan untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) diakhir periode dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) diawal periode yang disebut sebagai *Work in Progress* (WIP). Sehingga total output pada kategori ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, dan CBR atau WIP ditambah dengan nilai pelengkap.

Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu subkategori diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga dasar dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara. Estimasi NPT atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalikan produksi ditahun berjalan dengan harga pada tahun dasar (tahun 2010) untuk mengestimasi output konstan tahun berjalan.

2.2 Pertambangan dan Penggalian

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu: pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

2.2.1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi

Subkategori Pertambangan migas dan panas bumi meliputi kegiatan produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta pencarian cairan hidrokarbon. Subkategori ini juga mencakup kegiatan operasi dan/atau pengembangan lokasi penambangan minyak, gas alam, dan panas bumi.

Pendekatan perhitungan yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing periode penghitungan. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi.

Data produksi untuk pertambangan migas diperoleh dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjet Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Data harga/Indikator Harga juga diperoleh dari Ditjen Migas, ESDM, Statistik PLN, dan Indeks Harga Produsen (IHP) Gas dan Panas Bumi sebagai penggerak harga gas alam dan panas bumi setiap triwulan; Data Struktur Biaya diperoleh dari Laporan Keuangan Perusahaan, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Statistik Pertambangan Migas BPS. Data harga minyak mentah menggunakan *Indonesia Crude Price* (ICP), harga gas bumi pada tahun 2010 yang digerakan berdasarkan IHP Gas dan Panas Bumi. Harga uap panas bumi menggunakan harga panas bumi yang terdapat pada publikasi tahunan Statistik PLN dan digerakkan dengan IHP gas dan panas bumi untuk mendapatkan harga triwulanan.

2.2.2 Pertambangan Batubara dan Lignit

Pertambangan Batubara mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous, dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan. Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan, dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau

memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batubara dari kumpulan tepung bara.

Pertambangan Lignit mencakup penambangan di permukaan tanah termasuk penambangan dengan metode pencairan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan.

Untuk memperoleh output batubara dan lignit digunakan metode pendekatan produksi. Untuk memperoleh NTB atas dasar harga berlaku dan konstan 2010 digunakan dengan cara yang sama seperti pada subkategori pertambangan migas yaitu revaluasi. Data produksi batubara dan lignit serta Harga Batubara Acuan (HBA) diperoleh dari Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM; Statistik Pertambangan Non Migas BPS serta beberapa data dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota; Dinas Pendapatan Daerah.

2.2.3 Pertambangan Bijih Logam

Subkategori ini mencakup pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, alumunium, tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain. Termasuk bijih logam mulia lainnya. Kelompok bijih logam mulia lainnya mencakup pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya.

Beberapa jenis produknya, antara lain: pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutan dan proses aglomerasi bijih besi, pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, alumunium (bauksit), tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain-lain; serta pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak, dan logam mulia lainnya.

Penghitungan output bijih logam menggunakan metode pendekatan produksi dan NTB atas dasar konstan dihitung dengan menggunakan deflator Indeks harga Produsen (IHP) tembaga dan emas.

2.2.4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Subkategori ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut diatas. Termasuk dalam subkategori ini

adalah komoditi garam hasil penggalian. Output dan produksi barang-barang galian terdapat pada publikasi Statistik Penggalian Tahunan. Sementara itu PDB triwulan diestimasi menggunakan data produksi bahan galian dari Survei Khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi (DNP).

2.3 Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

2.3.1 Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi

Subkategori ini mencakup kegiatan perubahan minyak, gas bumi, dan batubara menjadi produk yang bermanfaat seperti: pengilangan minyak dan gas bumi, dimana meliputi pemisahan minyak bumi menjadi produk komponen melalui teknis seperti pemecahan dan penyulingan. Produk khas yang dihasilkan: kokas, butane, petrol, gas hidrokarbon dan metan, gasoline, minyak tanah, gas etane, propane, dan butane sebagai produk penyulingan minyak. Termasuk disini adalah pengoperasian tungku batubara, produksi batubara dan semi batubara, gas batubara, ter, lignit dan kokas, KBLI 2009: kode 19.

2.3.2 Industri Makanan dan Minuman

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori, yaitu Industri Makanan dan Industri Minuman. Industri Makanan mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan. Industri Minuman mencakup pembuatan minuman beralkohol maupun tidak beralkohol, air minum mineral, bir dan

anggur, dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran, minuman dengan bahan baku susu, dan pembuatan produk teh, kopi dan produk teh dengan kadar kafein yang tinggi. KBLI 2009: kode 10 dan 11.

2.3.3 Industri Pengolahan Tembakau

Subkategori ini meliputi pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu, cengklong, snuff, chewing, dan pemotongan serta pengeringan tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau. Beberapa produk yang dihasilkan rokok dan cerutu, tembakau pipa, tembakau sedot (*snuff*), rokok kretek, rokok putih dan lain-lain. KBLI 2009: kode 12.

2.3.4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu Industri Tekstil dan Industri Pakaian Jadi. Industri Tekstil mencakup pengolahan, pemintalan, penununan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti: sprei, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali, dan lain-lain). Industri Pakaian Jadi mencakup semua pekerjaan menjahit dari semua bahan dan semua jenis pakaian dan aksesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju anak-anak dan orang dewasa, atau pakaian tradisional dan modern. Subkategori ini juga mencakup pembuatan industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu). Contoh produk yang dihasilkan: kain tenun ikat, benang, kain, batik, rajutan, pakaian jadi, pakaian sesuai pesanan, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 13 dan 14.

2.3.5 Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki

Subkategori ini mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Subkategori ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 15.

2.3.6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman

Subkategori ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, Subkategori ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Subkategori ini tidak mencakup pembuatan mebel, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya. Contohnya: pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso, papan, pengolahan rotan, kayu lapis, barang-barang bangunan dari kayu, kerajinan dari kayu, alat dapur dari kayu, rotan dan bambu. KBLI 2009: kode 16.

2.3.7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu Industri Kertas dan Barang dari Kertas, dan Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekam. Industri Kertas dan Barang dari Kertas mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan. Pembuatan dari produk-produk tersebut merupakan satu rangkaian dengan tiga kegiatan utama. Kegiatan pertama pembuatan bubur kertas, lalu yang kedua pembuatan kertas yang menjadi lembaran-lembaran dan yang ketiga barang dari kertas dengan berbagai tehnik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama. Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekam mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan Industri Pencetakan; proses pencetakan termasuk bermacam-macam metode/cara untuk memindahkan suatu image dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai teknologi pencetakan. KBLI 2009: kode 17 dan 18.

2.3.8 Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional

Subkategori ini terdiri dari dua industri yaitu Industri Kimia dan Industri Farmasi dan Obat Tradisional. Industri Kimia mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Ciri produk kimia dasar yaitu yang membentuk kelompok industri pertama dari hasil produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya. Industri Farmasi dan Obat Tradisional mencakup

pembuatan produk farmasi dasar dan preparat farmasi. Golongan ini mencakup antara lain preparat darah, obat-obatan jadi, preparat diagnostik, preparat medis, obat tradisional atau jamu dan produk botanikal untuk keperluan farmasi: KBLI 2009: kode 20 dan 21.

2.3.9 Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik

Subkategori ini mencakup pembuatan barang plastik dan karet dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Misalnya; pembuatan karet alam, pembuatan ban karet untuk semua jenis kendaraan dan peralatan, pengolahan dasar plastik atau daur ulang. Namun demikian tidak berarti bahwa semua barang dari bahan baku karet dan plastik termasuk di golongan ini, misalnya industri alas kain dari karet, industri lem, industri matras, industri permainan dari karet, termasuk kolam renang mainan anak-anak. KBLI 2009: kode 22.

2.3.10 Industri Barang Galian Bukan Logam

Kegiatan ini mencakup pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti gelas dan produk gelas, produk keramik dan tanah liat bakar, semen, dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya juga termasuk disini. KBLI 2009: kode 23.

2.3.11 Industri Logam Dasar

Subkategori ini mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bungkahan dengan penggunaan bermacam teknik metalurgi. Contoh produk: industri besi dan baja dasar; penggilingan baja, pipa, sambungan pipa dan baja, logam mulia, logam dasar bukan besi dan lain-lain. KBLI: kode 24.

2.3.12 Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik

Subkategori ini mencakup pembuatan produk logam "murni" (seperti: suku cadang, container/wadah dan struktur), pada umumnya mempunyai fungsi statis atau tidak bergerak, pembuatan perlengkapan senjata dan amunisi, pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya, pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik. KBLI 2009: kode 25, 26 dan 27.

2.3.13 Industri Mesin dan Perlengkapan

Kegiatan ini tercakup dalam Subkategori Industri Mesin dan Perlengkapan adalah pembuatan mesin dan peralatan yang dapat bekerja bebas baik secara mekanik atau yang berhubungan dengan pengolahan bahan-bahan, termasuk komponen mekaniknya yang menghasilkan dan menggunakan tenaga dan komponen utama yang dihasilkan secara khusus. Subkategori ini juga mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus untuk angkutan penumpang atau barang dalam dasar pembatasan, peralatan tangan, peralatan tetap atau bergerak tanpa memperhatikan apakah peralatan tersebut dibuat untuk keperluan industri, pekerjaan sipil, dan bangunan, pertanian dan rumah tangga. KBLI 2009: kode 28.

2.3.14 Industri Alat Angkutan

Subkategori ini mencakup Industri kendaraan bermotor dan semi trailer serta Industri alat angkutan lainnya. Cakupan dari golongan ini adalah pembuatan kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang atau barang, alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara dan pesawat angkasa. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai suku cadang aksesoris kendaraan bermotor, termasuk pembuatan trailer atau semi trailer. KBLI 2009: kode 29 dan 30.

2.3.15 Industri Furnitur

Industri Furnitur mencakup pembuatan mebeller dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen dan keramik. Pengolahan pembuatan mebeller adalah metode standar, yaitu pembentukan bukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan pencetakan dan pelapisan. Perancangan produk baik untuk estetika dan kualitas fungsi adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan mebeller cenderung menjadi kegiatan yang khusus. KBLI 2009: kode 31.

2.3.16 Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

Subkategori ini mencakup pembuatan berbagai macam barang yang belum dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini. Subkategori ini merupakan gabungan dari industri pengolahan lainnya dan jasa reparasi serta pemasangan mesin dan peralatan. Subkategori ini bersifat residual, proses produksi, bahan input dan penggunaan barang-

barang yang dihasilkan dapat berubah-ubah secara luas dan ukuran umum. Subkategori ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga. Tetapi mencakup perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan khusus barang-barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan dan produk lainnya. KBLI: kode 32 dan 33.

Subkategori data Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi terdiri dari: Data produksi Pengilangan Migas diperoleh dari Ditjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Data Produksi/indikator produksi Industri Batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Industri BPS. Data harga produk pengilangan minyak bumi diperoleh dari Ditjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, harga LNG diperoleh dari harga ekspor LNG dari Direktorat Statistik Distribusi BPS, kurs ekspor dari Direktorat Neraca Pengeluaran BPS, sedangkan indikator harga untuk industri Batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Harga BPS. Data struktur biaya diperoleh dari Publikasi Statistik Pertambangan Migas BPS.

Sumber data Industri Makanan dan Minuman sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan terdiri dari: Produksi/Indikator Produksi yang dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Indeks produksi Industri Besar Sedang (IBS) dan indeks produksi Industri Mikro dan Kecil (IMK) diperoleh dari Direktorat Statistik Industri BPS. Data Harga/Indikator Harga diperoleh dari Direktorat Statistik Harga BPS. Data Struktur Biaya diperkirakan dari Hasil Survei Tahunan IBS dan Hasil Survei Tahunan IMK BPS ditambah dengan berbagai Survei Khusus yang dilakukan DNP.

Pendekatan penghitungan untuk kegiatan Industri Pengolahan Migas menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku adalah merupakan perkalian antara produksi dengan harga untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga konstan digunakan cara revaluasi, yaitu produksi pada masing-masing tahun dikalikan dengan harga pada tahun dasar 2010. NPB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih output atas dasar harga konstan dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan.

Pendekatan estimasi untuk Industri Batubara sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga konstan menggunakan pendekatan ekstrapolasi yaitu perkalian antara output tahun dasar dengan indeks produksi untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga berlaku dihitung dari output

atas dasar harga konstan dikalikan indeks harga pada masing-masing tahun. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari output atas dasar harga konstan dikurangi dengan konsumsi antara harga konstan.

Dalam penghitungan NTB Industri pengolahan subkategori ini, tabel SUT 2010 menjadi acuan sebagai tahun dasar 2010.

2.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC.

2.4.1 Ketenagalistrikan

Subkategori ini mencakup pembangkitan, pengiriman dan penyaluran tenaga listrik kepada konsumen, baik yang diselenggarakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun oleh perusahaan swasta (Non-PLN), seperti pembangkit listrik oleh perusahaan milik Pemerintah Daerah, dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dan transmisi dan distribusi, dan listrik yang dicuri.

Metode penghitungan dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga dasar per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga dasar per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Data yang diperlukan data produksi dan harga. Data produksi berupa listrik terjual dan listrik dibangkitkan baik oleh PLN maupun Non-PLN. Sama seperti data produksi, harga juga mencakup harga penjualan dan harga pembangkitan, baik data produksi maupun data harga, diambil dari PT. PLN setiap triwulan dan juga statistik PLN yang terbit setiap tahun. Selain itu juga diperlukan data subsidi listrik dari Kementerian Keuangan.

2.4.2 Pengadaan Gas dan Produksi Es

Subkategori ini menghasilkan Gas Alam, Gas Buatan, Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es. Subkategori ini mencakup pembuatan gas pendistribusian gas alam atau gas buatan ke konsumen melalui suatu sistem saluran pipa, dan kegiatan penjualan gas. Subkategori ini juga mencakup penyediaan gas melalui berbagai proses, pengangkutan, pendistribusian dan penyediaan semua jenis bahan bakar gas, penjualan gas kepada konsumen melalui saluran pipa. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang mengurus perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian perubahan komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.

Kegiatan pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es mencakup kegiatan produksi, pengumpulan dan pendistribusian uap dan air panas untuk pemanas, energi dan tujuan lain, produksi dan distribusi pendingin udara, pendinginan air untuk tujuan pendinginan dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan.

Metode perhitungan seri 2010 dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010, adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Sumber data produksi dan harga gas kota diperoleh dari PT. PGN (Persero). Data produksi dilaporkan langsung oleh PT. PGN setiap tiga bulan. Sementara data harga dikutip dari laporan keuangan PT. PGN yang terbit setiap tiga bulanan. Untuk data harga, terdapat jeda satu triwulan sehingga harus diestimasi untuk triwulan terakhir.

2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi *input* dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

Metode penghitungan Nilai Tambah Bruto untuk pengadaan air tahun dasar 2010 menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Dan untuk data harga yang tidak tersedia pada tahun terakhir diperkirakan dengan kenaikan laju IHK komponen bahan bakar, penerangan dan air bersih. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Perhitungan pengelolaan Sampah/Limbah dengan pendekatan pendapatan. Dalam lembar kerja pengelolaan, pembuangan dan pembersihan sampah dilakukan oleh Pemerintah dan swasta. Kegiatan yang dilakukan pemerintah menggunakan APBN/APBD.

Sumber Data Produksi adalah BPS-Subdit Statistik Pertambangan dan Energi, APBD (Kemenkeu); data output sampah diperoleh dari Subdit Statistik IBS BPS; Data Harga diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS; Data Struktur Biaya diperoleh dari Hasil Survei Tahunan Air Bersih BPS.

2.6 Konstruksi

Kategori konstruksi adalah kegiatan usaha dibidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di

lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain: Konstruksi gedung tempat tinggal; Konstruksi gedung bukan tempat tinggal; Konstruksi bangunan sipil, misal: jalan tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya; Konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi; pembangkit tenaga listrik; transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya; Instalasi gedung dan bangunan sipil: instalasi listrik termasuk alat pendingin dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya; Pengerukan: meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam, dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat; Penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya; Penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan aluminium; pekerjaan lantai; dinding dan plafon gedung; pengecatan; pekerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pekerjaan eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya; Penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, bulldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya.

Metode yang digunakan untuk memperkirakan Output harga berlaku adalah metode ekstrapolasi dengan indeks konstruksi harga berlaku sebagai ekstraplatornya. Untuk mendapatkan Output harga konstan, output harga berlaku dideflasi dengan menggunakan IHPB Konstruksi sebagai deflator. Sementara konsumsi antara didapat dengan menggunakan metode *commodity flow* beberapa komoditas utama dari konsumsi antara, misalnya produksi semen, kayu, juga bahan galian. NTB berlaku didapat dari nilai output berlaku dikurangi dengan biaya antara berlaku. Sementara NTB konstan didapat dari mengalikan output konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data indikator produksi kayu log, bambu dan produk industri bukan migas dari Subdirektorat Neraca Barang BPS; Produksi aspal dari Statistik Perminyakan Indonesia (SPI) Ditjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); ekspor semen dari Subdirektorat Statistik Ekspor BPS dan Asosiasi Semen Indonesia (ASI); impor semen dan bahan bangunan SITC 3 digit dari Subdirektorat Statistik Impor BPS. Indikator harga berupa IHPB bahan bangunan dari Subdirektorat Statistik Harga

Perdagangan Besar BPS. Indeks konstruksi dari publikasi Statistik Konstruksi, Subdirektorat Statistik Konstruksi BPS.

2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha dibidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga melalui toko, *departement store*, kios, *mail-order houses*, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

2.7.1 Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, sebagaimana perdagangan besar dan eceran, perawatan dan pemeliharaan mobil dan motor baru maupun bekas. Termasuk perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesori mobil dan motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan.

2.7.2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup kegiatan ekonomi dibidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan selain produk mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi) juga merupakan cakupan dalam subkategori ini.

Output lapangan usaha perdagangan adalah margin perdagangan, yaitu nilai jual dikurangi nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pedagang. Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang "*commodity flow approach*". Margin perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio margin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang domestik ditambah impor barang dari luar negeri.

Kemudian output atau margin perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk memperoleh nilai tambah perdagangan. Sedangkan reparasi mobil dan sepeda motor dihitung dengan pendekatan produksi, dengan indikator produksinya adalah jumlah kendaraan. Untuk mendapatkan nilai tambah konstannya nilai tambah berlaku diperoleh di *-deflate* menggunakan IHK umum (BPS).

Sumber data yang digunakan dalam kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor adalah data output barang dari industri domestik (dari Subdit Neraca Barang dan Neraca Jasa, BPS), Statistik Transportasi (BPS), Impor Barang (BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS) dan survei lainnya yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi BPS.

2.8 Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang **berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau** udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas; angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai; danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan; pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa

penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

2.8.1 Angkutan Rel

Angkutan Rel untuk penumpang dan atau barang yang menggunakan jalan rel kereta melalui antar kota, dalam kota dan pengoperasian gerbong tidur atau gerbong makan kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI).

Metode estimasi yang digunakan yaitu pendekatan produksi. Indikator produksi adalah jumlah penumpang dan barang yang diangkut atau jumlah km-penumpang dan km-ton barang. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diolah dari laporan keuangan PT. KAI. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK Jasa Angkutan Jalan Rel dari Subdit Statistik Harga Konsumen BPS. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi yaitu dengan menggunakan jumlah penumpang dan barang sebagai ekstrapolatornya. NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh berdasarkan perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun 2010.

2.8.2 Angkutan Darat

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk pula kegiatan *charter*/sewa kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi; serta jasa angkutan dengan saluran pipa untuk mengangkut minyak mentah, gas alam, produk minyak, kimia dan air.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara indikator produksi (jumlah kendaraan wajib uji) dengan indikator harga (rata-rata output untuk masing-masing jenis alat angkutan). Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dengan indeks jumlah kendaraan sebagai ekstrapolatornya. NTB dihitung berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah kendaraan/armada wajib uji (taksi, angkot, bis dan truk) diperoleh dari Subdirektorat Info Lantas POLRI. Data untuk penghitungan struktur *output* dan rasio NTB diperoleh dari laporan keuangan PT. Perusahaan Pengangkutan Djakarta (Perum PPD), PT. Djawatan Angkoetan Motor RI (Perum DAMRI) dan beberapa perusahaan angkutan darat *go public* dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

2.8.3 Angkutan Laut

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan ke luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu kesatuan usaha, dimana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya dan data yang tersedia sulit untuk dipisahkan.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya. Output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode ekstrapolasi, yaitu indeks produksi jumlah penumpang dan indeks muat barang sebagai ekstrapolasinya. Sedangkan NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut dari PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang dan rata-rata output per barang diperoleh dari PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dan PT. Djakarta Lloyd, serta IHK jasa angkutan laut dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public* angkutan laut dari Bursa Efek Indonesia.

2.8.4 Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kendaraan dengan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal ferry.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harga yang terdiri dari angkutan sungai, danau serta penyeberangan. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi rata-rata tertimbang jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Selanjutnya, NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut diperoleh dari publikasi tahunan Statistik Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang, rata-rata output per barang dan rata-rata output per kendaraan diperoleh dari PT. Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, serta IHK jasa angkutan sungai,

danau dan penyeberangan dari Subdit Statistik harga Konsumen, BPS. Dalam perhitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba PT. ASDP Indonesia.

2.8.5 Angkutan udara

Kegiatan ini meliputi pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut, atau jumlah km-penumpang dan ton-km barang yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya untuk masing-masing angkutan penumpang dan barang baik domestik maupun internasional. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut. Sedangkan NTB diperoleh dengan mengalikan rasio NTB dengan outputnya untuk masing-masing harga tersebut.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut diperoleh dari PT. Angkasa Pura I (Kawasan Tengah dan Timur Indonesia) dan PT. Angkasa Pura II (Kawasan Barat Indonesia). Sedangkan indikator harga berupa rata-rata *output* per penumpang/km-penumpang dan rata-rata *output* per barang/km-ton barang diperoleh dari laporan perusahaan penerbangan nasional, PT. Garuda Indonesia Airlines dan PT. Merpati Nusantara Airlines; serta IHK jasa angkutan udara dari Subdit Statistik Konsumen, BPS.

2.8.6 Jasa Penunjang Angkutan, Pergudangan dan Pos dan Kurir

Mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa-jasa pelabuhan udara, laut, sungai, dan darat (terminal & parkir), jasa pelayanan bongkar muat barang darat dan laut, keagenan, penumpang, jasa ekspedisi, jalan tol, pergudangan, jasa pengujian kelayakan angkutan darat dan laut, jasa penumpang lainnya, pos dan jasa kurir.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Nilai output dan NTB atas dasar harga berlaku dari hasil pengolahan data pendapatan dan pengeluaran/biaya dari laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public*. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode deflasi, yaitu dengan membagi nilai output atas dasar harga berlaku dengan indeks harga

tahun 2010. Nilai NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan jasa penunjang angkutan diperoleh dari badan usaha milik negara, seperti PT. Angkasa Pura I & II, PT. Pelabuhan Indonesia I-IV, PT. Jasa Marga, PT. Varuna Tirta Prakasya, PT. Bhandha Ghara Reksa, PT. PBM Adhiguna Putera, PT. KBN, dan beberapa perusahaan *go public* dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan indikator harga berupa IHK sarana penunjang transpor dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

2.9.1 Penyediaan Akomodasi

Subkategori ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya (seperti: asrama atau rumah kost dengan makan maupun tidak dengan makan). Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau dengan makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi. Yang dimaksud akomodasi jangka pendek seperti hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap selama kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan, alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan.

NTB subkategori akomodasi diperoleh dengan menggunakan pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah malam kamar terjual dan indikator harganya adalah rata-rata tarif per malam kamar. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harganya. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan diperoleh berdasarkan perkalian output

dengan rasio NTB. Output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode revaluasi.

Data produksi menggunakan data malam kamar terjual dari Subdit Statistik Pariwisata, BPS. Indikator harga menggunakan data tarif dari Survei Hotel Tahunan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Pariwisata, BPS.

2.9.2 Penyediaan Makan dan Minum

Kegiatan subkategori ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran *self service* atau restoran *take away*, baik ditempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung outputnya yaitu melalui pendekatan produksi. Indikator produksinya berupa jumlah penduduk pertengahan tahun. Dan indikator harga berupa pengeluaran rata-rata per kapita atas makan minum jadi di luar rumah. Hasil perkalian kedua indikator tersebut diperoleh output atas dasar harga berlaku. Sedangkan, output atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi, dengan IHK kelompok makanan jadi, minuman, dan rokok sebagai deflator. Dan NTB atas dasar harga berlaku maupun konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB.

Data indikator produksi sub kategori penyedia makan dan minum bersumber dari Proyeksi Penduduk Indonesia Sensus Penduduk 2010-BPS. Sedangkan data indikator harga diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan IHK makanan jadi, minuman, dan rokok dari publikasi Indikator Ekonomi-BPS.

2.10 Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemrograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau

tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua penerbitan (cetakan, elektronik atau audio, pada internet, sebagai produk multimedia seperti cd rom, buku referensi dan lain-lain).

Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, video tape atau disk untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya. Selain itu juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain.

Kegiatan industri penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi) ini mencakup pembuatan isni siaran atau perolehan hak untuk menyalurkannya dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi, dan program hiburan, berita, perbincangan dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV.

Kegiatan industri telekomunikasi ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa yaitu pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasarkan pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya.

Kegiatan industri pemograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian dibidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak; perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku didapat dari nilai produksi/pendapatan hasil olahan survei industri besar dan sedang, serta laporan keuangan perusahaan-perusahaan *go public* bergerak di industri informasi dan telekomunikasi, sedangkan NTB atas dasar harga berlaku didapat dari penjumlahan upah dan gaji, laba/rugi, penyusutan, dan komponen-komponen lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode deflasi, dan NTB atas dasar harga konstan didapat dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan informasi diperoleh dari Subdit Statistik Industri Besar dan Sedang dan Subdit Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi BPS, perusahaan *go public* dibidang televisi dan teknologi informasi, Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman, Dirjen Ekraf Seni dan Budaya Kemendparekaf, sedangkan kegiatan telekomunikasi diperoleh dari perusahaan telekomunikasi *go public* seperti: PT. Telkom dan anak perusahaannya, PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel); PT. Indosat dan anak perusahaannya, Excel Axiata; PT. Bakrie Telecom; dan PT. Smartfren Telecom, sedangkan indikator harga berupa indeks harga seperti: IHP percetakan dan penerbitan dari Subdit Statistik Harga Produsen-BPS; IHK umum dan IHK jasa komunikasi dari Subdit Statistik Harga Konsumen-BPS.

2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang aset, seperti kegiatan perusahaan *holding* dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

2.11.1 Jasa Perantara Keuangan

Kegiatan ini mencakup kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, seperti: menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/menengah dan panjang. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok Jasa Perantara Keuangan sedangkan memberikan jasa lainnya hanya kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga, dan sebagainya. Kegiatan tersebut antara lain bank sentral, perbankan konvensional maupun syariah, bank swasta nasional, bank campuran dan asing, dan bank perkreditan rakyat, juga koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, baitul maal wantanwil dan jasa perantara moneter lainnya.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi untuk bank komersial (termasuk BPR) dan pendekatan pengeluaran untuk bank sentral (Bank Indonesia). Output atas dasar harga berlaku dari usaha bank komersial adalah jumlah penerimaan atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakaiannya, seperti

biaya administrasi atas transaksi dengan bank, dan imputasi jasa implisit bank yang diukur dengan menggunakan metode FISIM, juga pendapatan lainnya yang diperoleh karena melakukan kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga. Output bank sentral (Bank Indonesia) dihitung adalah jumlah atas biaya-biaya yang dikeluarkan, termasuk konsumsi antara, pengeluaran untuk upah/gaji pegawai, pajak, dan penyusutan. Sedangkan output KSP, BMT dan Jasa Moneter lainnya diperoleh dengan mengalikan rata-rata pendapatan usaha dengan masing-masing jumlah usahanya. Penghitungan NTB atas dasar harga konstan 2010 dilakukan dengan menggunakan metode deflasi dan sebagai deflatornya adalah IHK umum dan Indeks Implisit PDB tanpa Jasa Perantara Keuangan. Data output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari Bank Indonesia.

2.11.2 Asuransi dan Dana Pensiun

Asuransi dan Dana Pensiun mencakup penjaminan tunjangan hari tua serta polis asuransi dimana premi tersebut diinvestasikan untuk digunakan terhadap klaim yang akan datang.

- Asuransi dan Reasuransi

Asuransi dan Reasuransi adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung resiko-resiko atas terjadinya musibah/kecelakaan terhadap barang atau orang, termasuk tunjangan hari tua. Pihak bertanggung dapat menerima biaya atas hancur/rusaknya barang atau karena terjadinya kematian pihak bertanggung. Golongan ini mencakup kegiatan asuransi jiwa, asuransi non jiwa dan reasuransi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan asuransi dan reasuransi merupakan penjumlahan dari hasil *underwriting*, hasil investasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. NTB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen, BPS.

- Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala atau sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pensiun. Dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan dana pensiun merupakan hasil pengolahan laporan keuangan kegiatan tersebut. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan dana pensiun diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.11.3 Jasa Keuangan Lainnya

Jasa keuangan lainnya meliputi mencakup kegiatan *leasing*, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman. Subkategori ini mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa keuangan lainnya.

- Pegadaian

Pegadaian mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan pegadaian merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT. Pegadaian yang terdiri dari pendapatan sewa modal, pendapatan administrasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga

berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT. Pegadaian, dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

- **Lembaga Pembiayaan**

Lembaga pembiayaan mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan anjak piutang, dan pembiayaan leasing lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk *finance lease* untuk digunakan oleh penyewa (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pembiayaan konsumen mencakup usaha pembiayaan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Pembiayaan kartu kredit mencakup usaha pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit. Pembiayaan anjak piutang mencakup usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang suatu perusahaan.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan lembaga pembiayaan merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan pembiayaan. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga pembiayaan diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk Indeks Harga Konsumen (IHK) umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

- **Modal Ventura**

Modal Ventura mencakup kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan

keuangan perusahaan modal ventura. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan modal ventura diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk Indeks Harga Konsumen (IHK) umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.11.4 Jasa Penunjang Keuangan

Jasa penunjang keuangan meliputi kegiatan yang menyediakan jasa yang berhubungan erat dengan aktivitas jasa keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Subkategori ini mencakup kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek), manager investasi, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, wali amanat, jasa penukaran mata uang, jasa broker asuransi dan reasuransi, dan kegiatan penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun lainnya.

- Administrasi Pasar Uang (Bursa Efek)

Administrasi pasar uang (bursa efek) mencakup usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana perdagangan efek. Keegiatannya mencakup operasi dan pengawasan pasar uang, seperti kontrak komoditas, bursa surat berharga, serta bursa saham.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT. Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari pendapatan jasa transaksi efek, jasa pencatatan, jasa informasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) diperoleh dari PT. BEI, dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk Indeks Harga Konsumen (IHK) umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

- Manager Investasi

Manager investasi mencakup usaha mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

Metode estimasi untuk output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan manager investasi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan manager investasi diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk Indeks Harga Konsumen (IHK) umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

- Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga kliring dan penjamin mencakup usaha menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT. KPEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga kliring dan penjaminan diperoleh dari PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT. KPEI). Sedangkan untuk Indeks Harga Konsumen (IHK) umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian mencakup usaha menyelenggarakan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain, serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT.

KSEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga lembaga penyimpanan dan penyelesaian diperoleh dari PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI). Sedangkan untuk Indeks Harga Konsumen (IHK) umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

- **Wali Amanat**

Wali amanat (*trustee*) mencakup usaha pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan wali amanat. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan wali amanat diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk Indeks Harga Konsumen (IHK) umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

- **Jasa Penukaran Mata Uang**

Jasa penukaran mata uang (*money changer*) mencakup usaha jasa penukaran berbagai jenis mata uang, termasuk pelayanan penjualan mata uang.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan jasa penukaran mata uang. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa penukaran uang diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk Indeks Harga Konsumen (IHK) umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

- **Jasa Broker Asuransi dan Reasuransi**

Jasa broker asuransi dan reasuransi mencakup usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi milik tertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai penanggung.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan broker asuransi dan reasuransi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa broker asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk Indeks Harga Konsumen (IHK) umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.12 Real Estat

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung, pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estat adalah property berupa tanah dan bangunan.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per meter persegi. NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya indeks luas bangunan.

Sumber data usaha persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh berdasarkan hasil Susenas dan Sensus Penduduk, BPS. Sedangkan data produksi usaha persewaan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil penelitian asosiasi. Struktur input pada usaha

persewaan bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa (SKSPJ), BPS.

2.13 Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tour dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

- Jasa Hukum

Jasa hukum mencakup usaha jasa pengacara/penasihat hukum, notaris, lembaga bantuan hukum, serta jasa hukum lainnya.

- Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksaan

Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan mencakup usaha jasa pembukuan, penyusunan, dan analisis laporan keuangan, persiapan atau pemeriksaan laporan keuangan dan pengujian laporan serta sertifikasi keakuratannya, termasuk juga jasa konsultasi perpajakan.

- Jasa Arsitek dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Lainnya

Jasa arsitek dan teknik sipil serta konsultasi teknis mencakup usaha jasa konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan drafting, jasa arsitektur perencanaan perkotaan, jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, serta jasa inspeksi gedung atau bangunan.

- Periklanan

Periklanan mencakup usaha jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media, termasuk juga kegiatan menciptakan dan menempatkan iklan di surat kabar, majalah/tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya.

- **Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil**

Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil mencakup usaha jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya.

- **Jasa Penyalur Tenaga Kerja**

Jasa penyalur tenaga kerja mencakup usaha jasa penampungan dan penyaluran para tuna karya yang siap pakai, seperti agen penyalur jasa tenaga kerja Indonesia, agen penyalur pembantu rumah tangga dan lainnya.

- **Jasa Kebersihan umum Bangunan**

Jasa kebersihan umum bangunan mencakup usaha jasa kebersihan bermacam jenis gedung, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan, dan gedung sekolah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output kategori jasa perusahaan atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode revaluasi. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa jumlah tenaga kerja diperoleh dari Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS. Sedangkan untuk Indeks Harga Konsumen (IHK) umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislative, perpajakan, pertahanan negara, keamanan dan keselamatan negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan sosial wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini, meskipun dilakukan oleh badan pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistem sekolah (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk kategori Pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.

NTB administrasi pemerintahan atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan seluruh belanja pegawai dari kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jasa pemerintahan lainnya ditambah dengan penyusutan. Perkiraan NTB atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan cara ekstrapolasi. Dan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sipil menurut golongan kepangkatan sebagai ekstrapolatornya.

Data bersumber dari Realisasi APBN. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; Realisasi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan; Statistik Keuangan Pemerintah daerah (K1, K2, K3), BPS; Realisasi APBD, Biro Keuangan Pemerintah Daerah; Jumlah pegawai negeri sipil, Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

2.15 Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Perhitungan NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, dan untuk jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan produksi. Untuk NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar

harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Berbagai Survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Pengeluaran BPS; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakti; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (*Medical Evacuation*); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

Metode penghitungan untuk jasa pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, sedangkan swasta menggunakan pendekatan produksi. NTB jasa kesehatan dan kegiatan sosial pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Kesehatan; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas); Berbagai Survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Pengeluaran BPS; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.17 Jasa Lainnya

Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 (empat) kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk

memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan Perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

- **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi**

Jasa kesenian, Hiburan dan Rekreasi berkategori R meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan hiburan, kesenian, dan kreativitas, termasuk perpustakaan, arsip, museum, kegiatan kebudayaan lainnya, kegiatan perjudian dan pertaruhan, serta kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan produksi, yaitu output diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga. Output panggung hiburan/kesenian dihitung berdasarkan pajak tontonan yang diterima pemerintah. Output untuk jasa hiburan dan rekreasi lainnya pada umumnya didasarkan pada hasil perkalian antara jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja masing-masing dengan rata-rata output per indikatornya. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi/ekstrapolasi dengan deflator/ekstrapolatornya adalah IHK rekreasi dan olahraga/indeks indikator produksi yang sesuai.

Sumber data produksi Jasa Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi diperoleh dari beberapa sumber, yaitu: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan data penunjang intern BPS (Ketenagakerjaan, Susenas, Sensus Ekonomi, Statistik Harga Konsumen, dan Survei-survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran).

- **Kegiatan jasa Lainnya**

Kegiatan ini berkategori S yang mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, serta berbagai kegiatan jasa perorangan lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian antara masing-masing jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan untuk memperoleh output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi dimana deflatornya adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

Data diperoleh dari internal BPS (Sensus Ekonomi, Subdit Statistik Demografi, Susenas, dan Subdirektorat Statistik Harga Konsumen).

- Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan

Kegiatan ini berkategori K mencakup kegiatan yang memanfaatkan jasa perorangan untuk melayani rumah tangga yang didalamnya termasuk jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya), dan Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan (didalamnya termasuk kegiatan pertanian, industri, penggalian, konstruksi, dan pengadaan air).

Output atas dasar harga berlaku jasa perorangan yang melayani rumah tangga/ jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya) diperoleh dari perkalian antara pengeluaran per kapita untuk jasa pekerja domestik dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sedangkan NTB nya sama dengan output yang dihasilkan karena konsumsi antara pekerja jasa domestik merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga majikan. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan hasil survei intern BPS (SKTIR). Sedangkan output pengadaan air diperoleh dengan pendekatan rumah tangga yang menggunakan pompa dan sumur, baik sumur terlindung maupun tidak terlindung. Sementara itu, output dan NTB atas dasar harga konstan, baik untuk kegiatan pekerja domestik maupun kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk digunakan sendiri oleh rumah tangga diperoleh dengan menggunakan metode deflasi dengan deflatornya laju IHK umum.

Sumber data kategori ini diperoleh dari intern BPS yaitu Susenas, Sensus Penduduk, Subdirektorat Pertambangan, Energi dan Konstruksi (Publikasi Statistik Air Bersih) dan Survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Pengeluaran.

- Kegiatan Badan Internasional dan Ekstra Internasional Lainnya

Kategori U yang mencakup kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilannya, Badan Regional dan lain-lain, termasuk *The International Monetary Fund*, *The World Bank*, *The World Health Organization (WHO)*, *The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, *The Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)* dan lain-lain.

Output dan NTB berlaku diperoleh dengan pendekatan biaya yang didapatkan dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya. Sementara, untuk output konstan diperoleh dengan metode deflasi dengan deflator laju IHK umum.

Sumber data diperoleh dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya yang berkantor pusat di Indonesia dan Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

<http://bogorkota.pb.go.id>

III. TINJAUAN EKONOMI KOTA BOGOR

3.1. Struktur Ekonomi

Perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari besarnya PDRB serta cepat atau lambatnya perekonomian wilayah tersebut yang dilihat dari kinerja laju pertumbuhan ekonominya. Perekonomian Kota Bogor ditinjau dari PDRB nya senantiasa mengalami pertumbuhan yang signifikan, walaupun mengalami sedikit perlambatan pada tahun 2014 dan 2015 sebagai efek krisis nasional dan global. PDRB Kota Bogor tahun 2016 adalah 35,401 triliun rupiah.

Tabel 3.1 Nilai PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	221.051,69	231.430,61	241.575,71	253.951,95	269.243,76
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	4.472.511,44	4.837.978,73	5.393.074,47	5.998.600,60	6.538.497,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.267.307,38	1.514.730,25	1.960.761,41	1.925.046,85	1.970.649,85
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang	24.469,56	27.431,17	28.821,37	31.953,59	36.037,10
F	Konstruksi	2.620.430,97	2.964.539,77	3.280.102,82	3.647.802,34	3.937.651,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.290.523,34	5.927.802,78	6.476.574,46	7.088.063,38	7.643.843,99
H	Transportasi dan Pergudangan	2.549.233,55	2.894.270,97	3.151.053,52	3.776.163,74	4.210.072,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.014.412,50	1.170.326,11	1.294.452,08	1.421.383,40	1.586.007,85
J	Informasi dan Komunikasi	1.001.661,83	1.085.808,51	1.284.855,52	1.521.416,21	1.710.356,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.523.198,13	1.805.303,28	1.975.033,74	2.145.643,26	2.475.163,85
L	Real Estat	510.487,49	580.016,40	653.307,73	716.268,71	782.754,92
M, N	Jasa Perusahaan	471.293,84	533.352,85	593.665,21	675.244,69	746.138,04
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	746.018,69	787.881,00	880.975,97	955.878,40	1.019.031,66
P	Jasa Pendidikan	576.118,91	685.786,74	798.190,62	907.452,16	997.674,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	245.706,73	269.763,21	318.087,37	374.124,90	425.778,60
R, S, T, U	Jasa Lainnya	720.443,42	765.906,80	816.656,40	925.906,78	1.051.908,75
PDRB Total		23.254.869,5	26.082.329,2	29.147.188,4	32.364.901,0	35.400.811,3

Sumber : BPS Kota Bogor, 2017

Struktur perekonomian Kota Bogor dapat ditinjau dari besarnya proporsi peranan masing-masing kategori ekonomi terhadap total pembentukan PDRB Kota Bogor. Pada tahun 2015, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (21,59 persen) dan Kategori Industri Pengolahan (18,47 persen) mendominasi struktur perekonomian Kota Bogor. Struktur ekonomi ini sangat sesuai dengan karakteristik masyarakat Kota Bogor sebagai Kota Urban.

Tabel 3.2 Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor Tahun 2012-2016 (Persen)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015 [*])	2016 ^{**})
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,95	0,89	0,83	0,78	0,76
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	19,23	18,55	18,50	18,53	18,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,45	5,81	6,73	5,95	5,57
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10
F	Konstruksi	11,27	11,37	11,25	11,27	11,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,75	22,73	22,22	21,90	21,59
H	Transportasi dan Pergudangan	10,96	11,10	10,81	11,67	11,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,36	4,49	4,44	4,39	4,48
J	Informasi dan Komunikasi	4,31	4,16	4,41	4,70	4,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,55	6,92	6,78	6,63	6,99
L	Real Estat	2,20	2,22	2,24	2,21	2,21
M, N	Jasa Perusahaan	2,03	2,04	2,04	2,09	2,11
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,21	3,02	3,02	2,95	2,88
P	Jasa Pendidikan	2,48	2,63	2,74	2,80	2,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,06	1,03	1,09	1,16	1,20
R, S, T, U	Jasa Lainnya	3,10	2,94	2,80	2,86	2,97
PDRB Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Bogor, 2017

Kontribusi kategori yang menggambarkan struktur perekonomian Kota Bogor ini juga dapat digunakan untuk menentukan sektor ekonomi andalan wilayah. Sektor andalan atau *leading sector* ini memiliki peranan yang cukup vital dalam pembentukan PDRB serta memberikan *multiplier effect* yang besar bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Diharapkan penerapan kebijakan yang tepat terutama pada *leading sectors* dapat memacu pertumbuhan ekonomi wilayah dengan lebih cepat.

3.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan perekonomian Kota Bogor pada tahun 2016 mengalami percepatan cukup tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada tahun 2016 mencapai level 6,73 persen. Percepatan ini secara langsung maupun tidak langsung sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan global khususnya kondisi perekonomian di Provinsi Jawa Barat yang sedang giat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, serta percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi.

Jika dilihat lebih dalam, maka Kategori Informasi dan Komunikasi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dibandingkan kategori lainnya. Kategori ini tumbuh 12,36 persen pada tahun 2016. Pertumbuhan yang sangat cepat ini dipengaruhi oleh peralihan ekonomi dan budaya yang sangat mengandalkan daring (internet). Peningkatan akses terhadap internet mengakibatkan sektor informasi dan komunikasi berkembang pesat. Hal ini juga semakin mendorong semakin ketatnya persaingan usaha pada sektor tersebut.

Kategori lain yang pertumbuhannya juga cukup signifikan adalah Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi (10,17 persen) dan Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (8,98 persen). Sementara itu, Kategori Pengadaan Listrik dan Gas menjadi kategori lapangan usaha yang paling lambat tumbuh di Kota Bogor, hanya berkisar 0,55 persen pada 2016.

Pertumbuhan ekonomi di pada kategori-kategori sektor ekonomi tersier yang cukup cepat mengindikasikan bahwa pembangunan perekonomian Kota Bogor semakin bertumpu pada sektor-sektor non produksi, terutama mengandalkan perekonomian pada kategori jasa. Hal ini selaras dengan karakteristik Kota Bogor yang tidak memiliki potensi besar pada sektor produksi dan lebih bertumpu pada karakteristik urban. Pembangunan kategori sektor jasa membutuhkan *skill* masyarakat yang cukup tinggi dan tingkat pendidikan sebagai prasyarat keberhasilan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bogor harus memberikan prioritas pembangunan yang tepat dalam mendorong potensi kategori sektor tersier sebagai sasaran pembangunan regional.



Sumber : BPS Kota Bogor, 2017

3.3. PDRB Per Kapita

Nilai PDRB dapat mencerminkan gambaran perekonomian wilayah secara umum serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ukuran PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara kasar adalah nilai PDRB per kapita. Pada tahun 2016 PDRB per kapita penduduk Kota Bogor adalah 33,25 juta rupiah per tahun atau tumbuh sebesar 7,7 persen.

Tabel 3.3 PDRB Per Kapita di Kota Bogor 2011 – 2016**

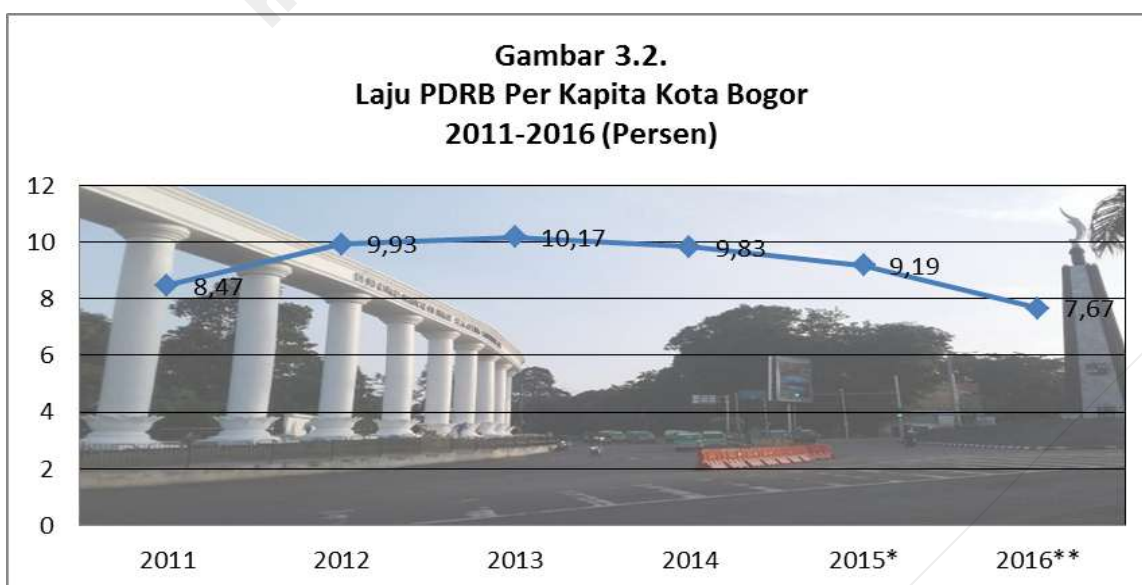
Tahun	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	Pertumbuhan PDRB Per Kapita (Persen)
2011	21,26	8,47
2012	23,27	9,93
2013	25,72	10,17
2014	28,23	9,83
2015*	30,88	9,19
2016**	33,25	7,67

Sumber : BPS Kota Bogor, 2017

Catatan : *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Ditinjau dari nilai PDRB per kapita yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun menandakan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat Kota Bogor secara umum sebagai akibat dari peningkatan output produksi sektor ekonominya. Namun demikian, angka kemakmuran yang diperoleh dari implikasi kenaikan PDRB per kapita belum dapat dijadikan ukuran baku kesejahteraan masyarakat karena belum mengandung unsur pemerataan distribusi pendapatan.



Sumber : BPS Kota Bogor, 2017

IV. PERKEMBANGAN PDRB KOTA BOGOR MENURUT LAPANGAN USAHA

PDRB Kota Bogor menurut lapangan usaha dapat dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha. Sebagian besar kategori dapat dirinci lagi menjadi beberapa subkategori atau Golongan. Pemecahan menjadi subkategori ataupun golongan usaha ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015. Untuk mendukung analisis perkembangan perekonomian secara umum, maka perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam dengan melihat perkembangan kegiatan perekonomian pada masing-masing kategori maupun subkategori.

4.1. Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Kategori A)

Kategori A ini merupakan kategori lapangan usaha yang berkontribusi terkecil dalam pembentukan PDRB Kota Bogor pada setiap periodenya. Hal ini disebabkan karakteristik wilayah serta potensi masyarakat Kota Bogor yang bersifat urban sehingga tidak cukup potensial dalam pengembangan kategori ini. Pada tahun 2016, kontribusi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan hanya sebesar 0,76 persen dari total PDRB Kota Bogor, atau hanya bernilai 269.243 Juta Rupiah.

Jika ditinjau dari kajian per subkategorinya, maka Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan jasa Pertanian memiliki kontribusi terbesar, yaitu sebesar 98,68 persen dari total pembentukan PDRB Kategori A. Kontribusi yang paling besar disumbang oleh komoditas tanaman hortikultura semusim, yaitu sebesar 74,67 persen pada seluruh pembentukan PDRB Kategori A.



Sumber : BPS Kota Bogor, 2017

Laju pertumbuhan kategori ini juga menunjukkan level yang cukup stabil dari tahun ke tahun, yaitu pada kisaran 2 persen. Walaupun cenderung mengalami perlambatan pada tahun-tahun terakhir. Jika pada tahun 2012 pertumbuhannya mencapai level 2,52 persen maka pada tahun 2016 hanya tumbuh sebesar 2,22 persen. Sesuai dengan karakteristik perekonomian Kota Bogor yang tidak potensial untuk mengembangkan kategori lapangan usaha ini, maka diprediksikan bahwa pada tahun-tahun mendatang pertumbuhan sektor ini akan terus melambat.

4.2. Kategori Pertambangan dan Penggalian (Kategori B)

Kota Bogor tidak memiliki potensi kegiatan perekonomian pada Kategori B, Pertambangan dan Penggalian. Ditemukan kegiatan penggalian pasir di beberapa titik namun sifatnya hanya musiman dengan nilai yang sangat kecil. Sehingga untuk Kategori B tidak dapat dilakukan analisis lebih mendalam.

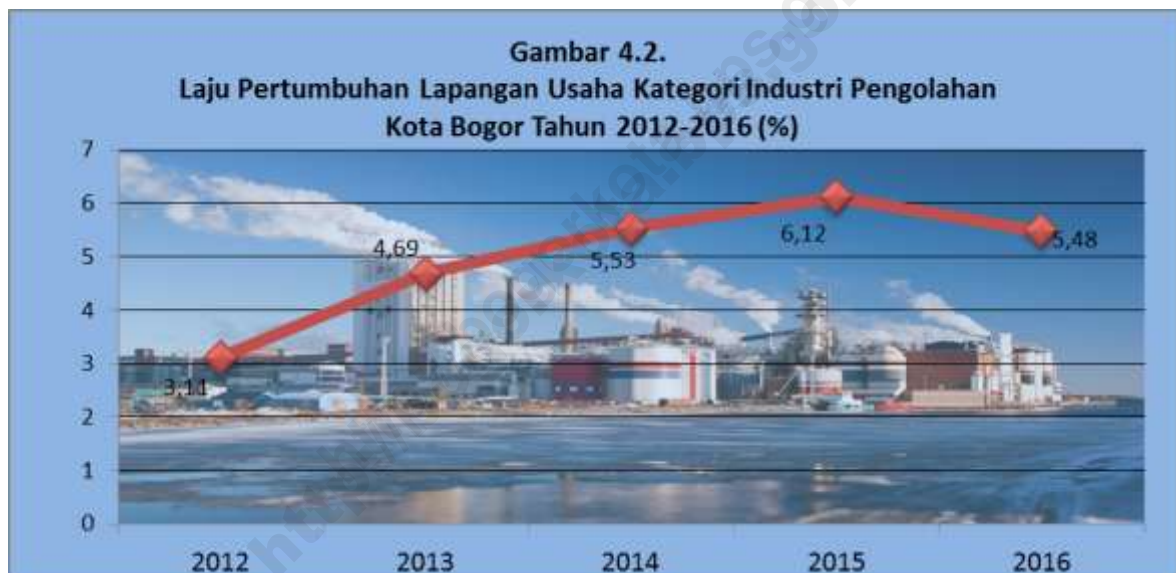
4.3. Kategori Industri Pengolahan (Kategori C)

Kontribusi Kategori C, Industri Pengolahan ini sangat besar dalam pembentukan PDRB Kota Bogor jika dibandingkan dengan kategori lapangan usaha lainnya. Pada tahun 2015, kontribusi Kategori C ini sebesar 18,47 persen atau sebesar 6,54 Triliyun Rupiah.

Golongan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi merupakan golongan dengan kontribusi terbesar pada Kategori C dengan mencapai kontribusi sebesar 43,53 persen

pada total PDRB keseluruhan industri pengolahan di Kota Bogor. Dengan besarnya kontribusi golongan ini maka dapat dijadikan *leading sector* perekonomian yang diandalkan untuk memberikan daya dorong yang kuat dalam memicu perkembangan sektor-sektor lainnya. Diharapkan pula golongan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi ini menjadi sektor lapangan usaha yang dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak untuk mengatasi masalah pengangguran di Kota Bogor.

Jika ditinjau dari sisi pertumbuhannya, maka pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan pada tahun 2016 melambat dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2016 pertumbuhan kategori ini mencapai 5,48 persen. Laju pertumbuhan pada kategori ini distimulus oleh cepatnya laju pertumbuhan Sub Kategori Industri Makanan dan Minuman (9,86 persen) dan laju pertumbuhan Sub Kategori Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional (7,44 persen).



Sumber : BPS Kota Bogor, 2017

4.4. Kategori Pengadaan Listrik dan Gas (Kategori D)

Kategori D, Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 5,57 persen pada PDRB Kota Bogor tahun 2016. Kontribusi besar pada kategori ini didukung oleh golongan Pengadaan Gas dan Produksi Es, sebesar 97,84 persen. Laju pertumbuhan kategori ini mengalami pertumbuhan 0,55 persen tahun 2016, membaik setelah tumbuh negatif pada tahun 2015 sebesar 12,37 persen. Peranan kategori ini cukup penting dalam perkembangan perekonomian wilayah Kota Bogor.



Sumber : BPS Kota Bogor, 2017

4.5. Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang (Kategori E)

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk dalam kegiatan ini adalah kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dan sebagainya. Nilai PDRB yang terbentuk pada kategori ini pada tahun 2016 sebesar 36,04 Milyar Rupiah dan berkontribusi sebesar 0,10 persen. Laju pertumbuhan kategori lapangan usaha ini melambat dibanding tahun-tahun sebelumnya.



Sumber : BPS Kota Bogor, 2017

4.6. Kategori Kontruksi (Kategori F)

Kategori Kontruksi merupakan lapangan usaha yang cukup vital pada pembangunan perekonomian wilayah. Kategori lapangan usaha ini memiliki peranan untuk mendorong tercapainya pembangunan infrastruktur serta penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Pada tahun 2016, kontribusi Kategori Kontruksi dalam pembentukan PDRB Kota Bogor sebesar 11,12 persen, atau bernilai 3,94 Triliyun Rupiah.



Sumber : BPS Kota Bogor, 2017

Sesuai dengan perkembangan infrastruktur yang akan terus berkembang seperti pembangunan jalan tol, jalan lingkar serta pembangunan pemukiman yang terus berlangsung di Kota Bogor, maka dapat diprediksikan bahwa Kategori Kontruksi akan terus dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada pembangunan wilayah yang terus berlangsung. Laju pertumbuhan yang cukup stabil pada kisaran 5 persen setiap tahun pada Kategori Kontruksi ini dapat dimanfaatkan untuk menstimulus pembangunan kategori lapangan usaha lainnya.

4.7. Kategori Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G)

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, Kategori G ini memiliki kontribusi yang paling besar dalam pembentukan PDRB Kota Bogor dengan kisaran 22 persen. Pada tahun 2016, distribusi persentase kategori ini adalah 21,59 persen pada PDRB Kota Bogor, atau senilai 7,64 Triliyun Rupiah. Golongan yang dominan pada kategori ini adalah Golongan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, bukan mobil dan sepeda motor, yang menyumbang 85,36 persen.

Sesuai dengan karakteristik perekonomian Kota Bogor, maka kategori ini diprediksikan akan terus memberikan kontribusi yang semakin besar di masa yang akan datang pada perekonomian Kota Bogor. Peranan kategori ini diprediksikan akan terus mengalami peningkatan diiringi dengan kecepatan laju pertumbuhannya. Hal ini terjadi pada sub kategori 1 maupun 2.



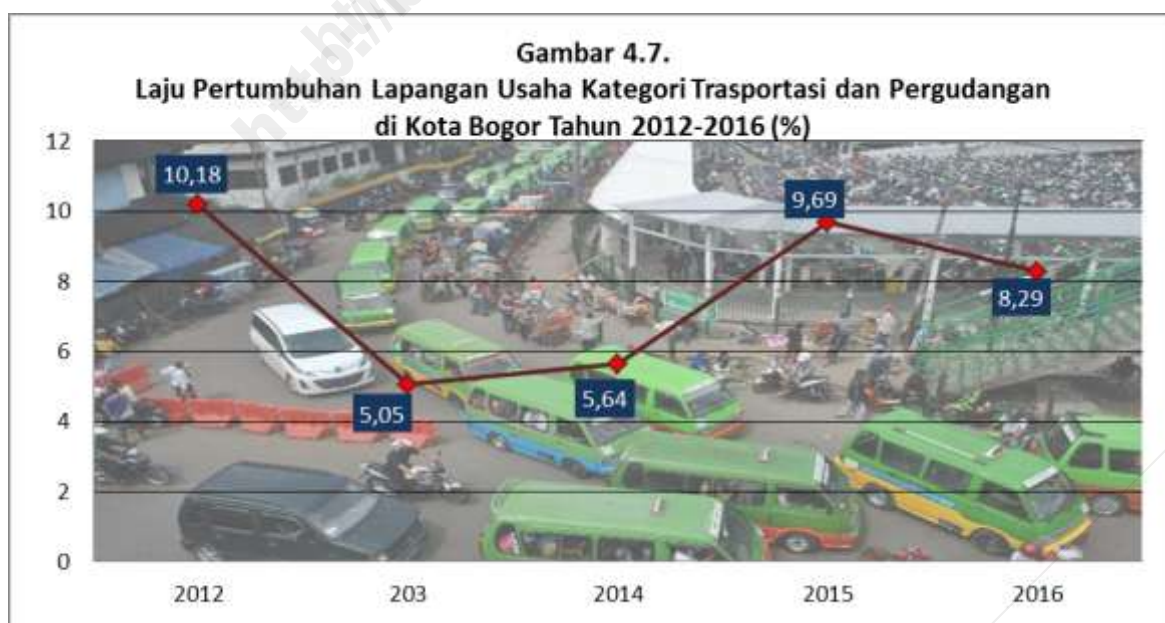
Sumber : BPS Kota Bogor, 2017

4.8. Kategori Transportasi dan Pergudangan (Kategori H)

Menurut KBLI 2015, yang termasuk pada Kategori Transportasi dan Pergudangan ada 6 subkategori, namun hanya ada tiga subkategori yang kegiatan ekonominya ditemui di Kota Bogor, yaitu angkutan rel, angkutan darat serta pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Pada tahun 2016 besaran PDRB yang tercipta dari kategori ini sebesar 4,21 Trilyun Rupiah atau memiliki kontribusi sebesar 11,89 persen. Kontribusi yang cukup signifikan bagi perekonomian wilayah Kota Bogor.

Jika ditinjau dari laju pertumbuhannya, maka kategori ini mengalami puncak pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012 dan mengalami perlambatan pada tahun 2013 dan 2014 kemudian pada tahun 2015 kembali mengalami percepatan hingga mencapai 9,69 persen dan sedikit melambat pada tahun 2016. Terjadi fenomena substitusi pada pertumbuhan laju subkategori angkutan rel dan angkutan darat pada tahun 2012. Pada periode itu penurunan laju yang tajam pada angkutan rel diiringi dengan percepatan pertumbuhan pada sub kategori angkutan darat. Fenomena ini diakibatkan program penghapusan tiket abonemen kereta Jabodetabek yang berakibat pada penurunan drastis jumlah penumpangnya.

Pada tahun 2013, dengan diterapkannya manajemen baru *Commuter Line* disertai sosialisasi *ticketing system* pada para pengguna, jumlah penumpang kembali melonjak tajam mengakibatkan subkategori angkutan rel mengalami pertumbuhan yang sangat cepat.



Sumber : BPS Kota Bogor, 2017

4.9. Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Kategori I)

Kategori Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang terdiri dari subkategori penyediaan akomodasi dan subkategori makan minum berkontribusi sebesar 4,48 persen atau sebesar 1,59 Triliyun Rupiah. Kontribusi kategori ini akan terus tumbuh seiring bertambahnya jumlah hotel dan tujuan wisata kuliner di Kota Bogor.

Ditinjau dari laju pertumbuhannya, maka Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum ini mengalami pertumbuhan yang cepat pada tahun 2016 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 pertumbuhannya 5,70 persen dan pada tahun 2016 menjadi 8,05 persen.



Sumber : BPS Kota Bogor, 2017

4.10. Kategori Informasi dan Komunikasi (Kategori J)

Kategori J, Informasi dan Komunikasi merupakan kategori yang memberikan kontribusi cukup signifikan pada PDRB Kota Bogor sebesar 4,83 persen. Pada tahun 2016 PDRB yang terbentuk dari kategori ini sebesar 1,71 Triliyun Rupiah. Kategori lapangan usaha ini juga memiliki potensi untuk terus tumbuh dan berkembang di masa mendatang mengingat peranannya yang sangat vital. Kategori Informasi dan Komunikasi memiliki laju pertumbuhan masih paling cepat di Kota Bogor, yaitu 12,36 persen, jika dibandingkan dengan kategori-kategori lainnya. Walaupun fakta ini menunjukkan sedikit perlambatan laju pertumbuhan jika dibandingkan 2 tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 18 persen per tahun. Hal ini menunjukkan peranan kategori ini sangat vital dimasa mendatang.

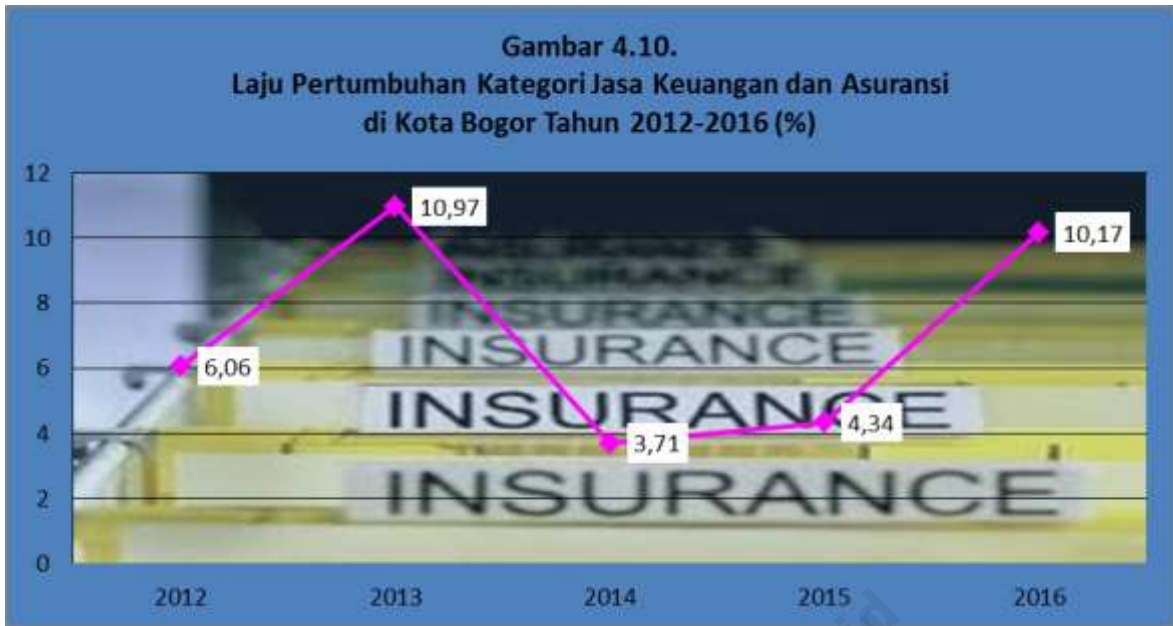


Sumber : BPS Kota Bogor, 2017

4.11. Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi (Kategori K)

Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi di Kota Bogor memberikan kontribusi sebesar 6,99 persen atau sebesar 2,48 Trilyun Rupiah. Kontribusi yang besar ini didominasi oleh subkategori Jasa perantara Keuangan yang berperan sebesar 56,65 persen dari total kontribusi kategori ini. Sementara yang paling kecil peranannya pada kategori ini adalah subkategori Jasa Penunjang Keuangan, hanya 1 persen.

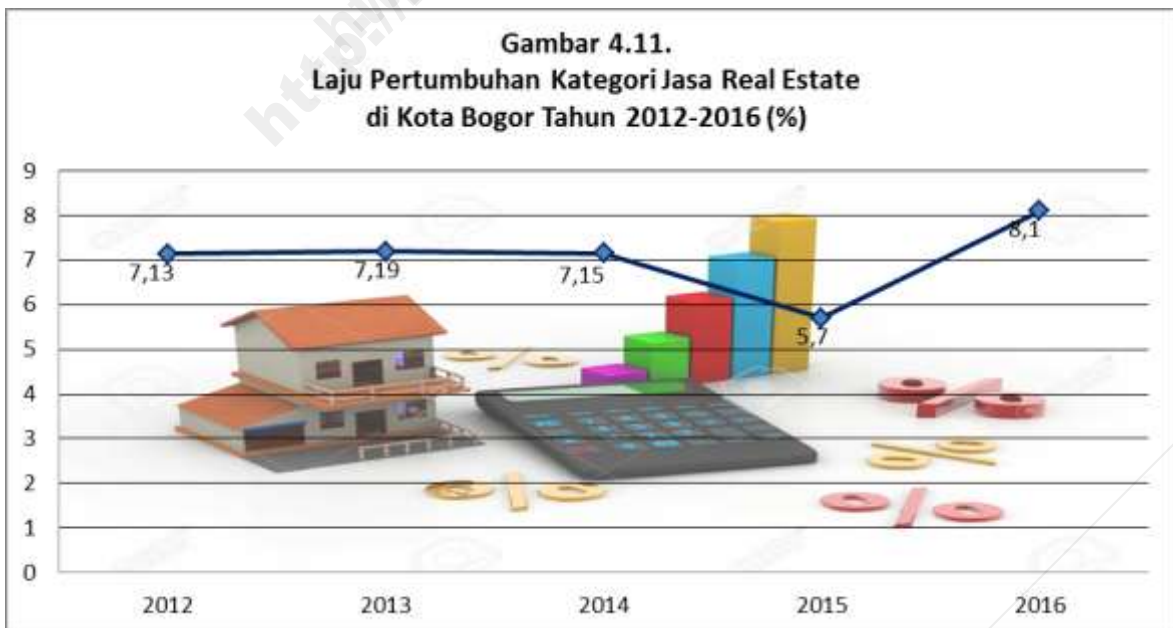
Pertumbuhan kategori ini sangat fluktuatif sepanjang periode 2011 sampai dengan 2016. Secara umum mengalami laju pertumbuhan yang sangat cepat pada 2013 dan melambat dengan sangat cepat pula pada 2014 namun di tahun 2016 kembali mengalami Percepatan yang cukup signifikan.



Sumber : BPS Kota Bogor, 2016

4.12. Kategori Real Estate (Kategori L)

Kategori Real Estate berkontribusi sebesar 2,21 persen pada pembentukan PDRB Kota Bogor atau senilai 782,75 Milyar Rupiah pada tahun 2016. Laju pertumbuhan kategori ini lebih cepat dibanding tahun 2015, dengan mencapai level 8,10 persen, yang juga merupakan laju tercepat selama periode 2010 - 2016. Diharapkan peranan Kota Bogor sebagai Kota Penyangga Ibukota dapat meningkatkan pertumbuhan Kategori Real Estate di masa mendatang.



Sumber : BPS Kota Bogor, 2017

4.13. Kategori Jasa Perusahaan (Kategori M,N)

Kontribusi Kategori Jasa Perusahaan (M,N) dalam pembentukan Kota Bogor tahun 2016 sebesar 2,11 persen atau senilai 746,14 Milyar Rupiah. Laju pertumbuhan kategori lapangan usaha M.N pada tahun 2016 meningkat hingga mencapai level 8,39 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kategori ini memberikan peranan yang cukup tinggi bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bogor.



Sumber : BPS Kota Bogor, 2017

4.14. Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (Kategori O)

Kategori O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib meliputi kegiatan pemerintahan yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Pada tahun 2016 kategori ini memberikan peranan PDRB sebesar 1,02 triliun rupiah atau 2,88 persen. Laju pertumbuhan kategori ini pada tahun 2016 sedikit lebih lambat dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2015.



Sumber : BPS Kota Bogor, 2017

4.15. Kategori Jasa Pendidikan (Kategori P)

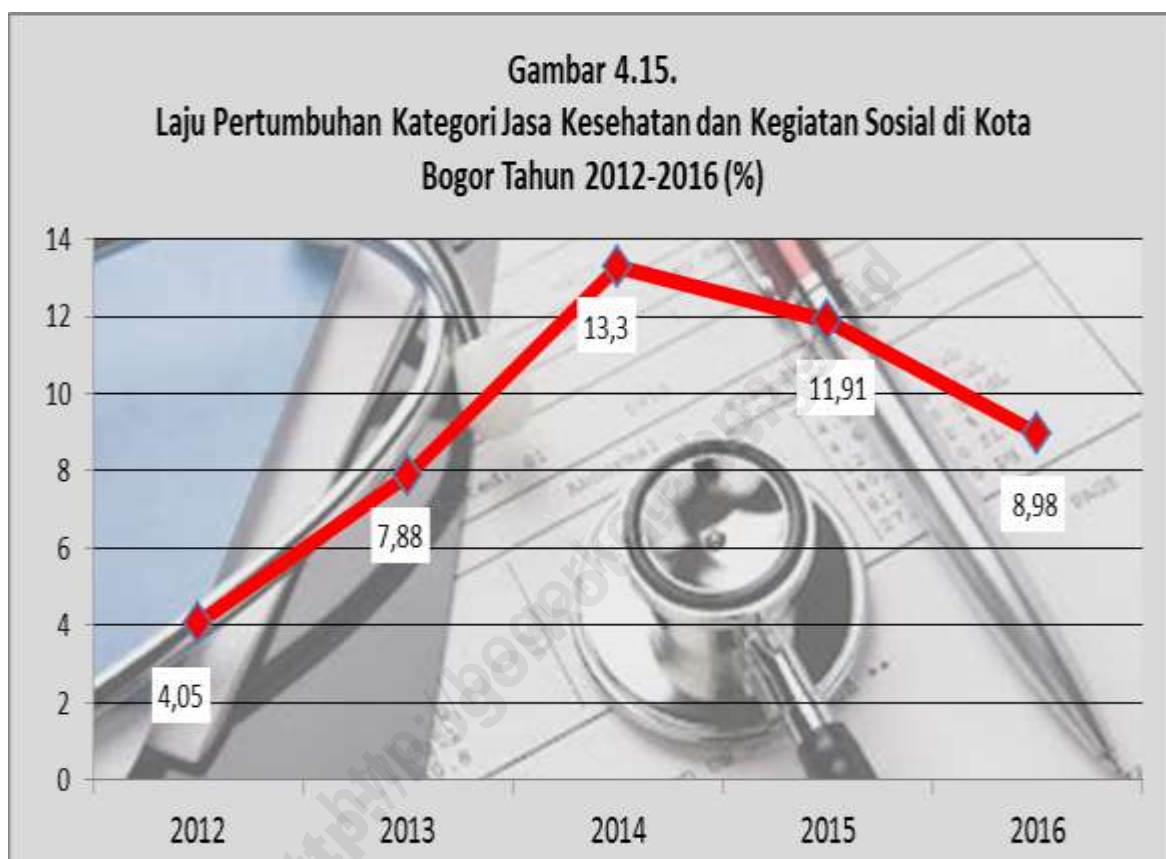
Pada tahun 2016 Kategori Jasa Pendidikan berkontribusi sebesar 2,82 persen. Nilai PDRB yang dihasilkan oleh kategori ini pada tahun 2016 sebesar 997,67 Milyar Rupiah. Laju pertumbuhan kategori ini melambat selama periode 2011 hingga 2016. Perlambatan laju kategori ini perlu perhatian serius Pemerintah Daerah Kota Bogor karena untuk karakteristik urban, kategori P dapat dijadikan sebagai sektor andalan.



Sumber : BPS Kota Bogor, 2017

4.16. Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Kategori Q)

Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial ini berperan sangat kecil di Kota Bogor dalam pembentukan PDRBnya hanya 1,20 persen, atau sebesar 425,78 Milyar Rupiah. Walaupun peranannya sangat kecil tapi pertumbuhan kategori lapangan usaha ini cukup cepat, mencapai 11,91 persen pada tahun 2015 dan melambat di level 8,98 pada 2016.

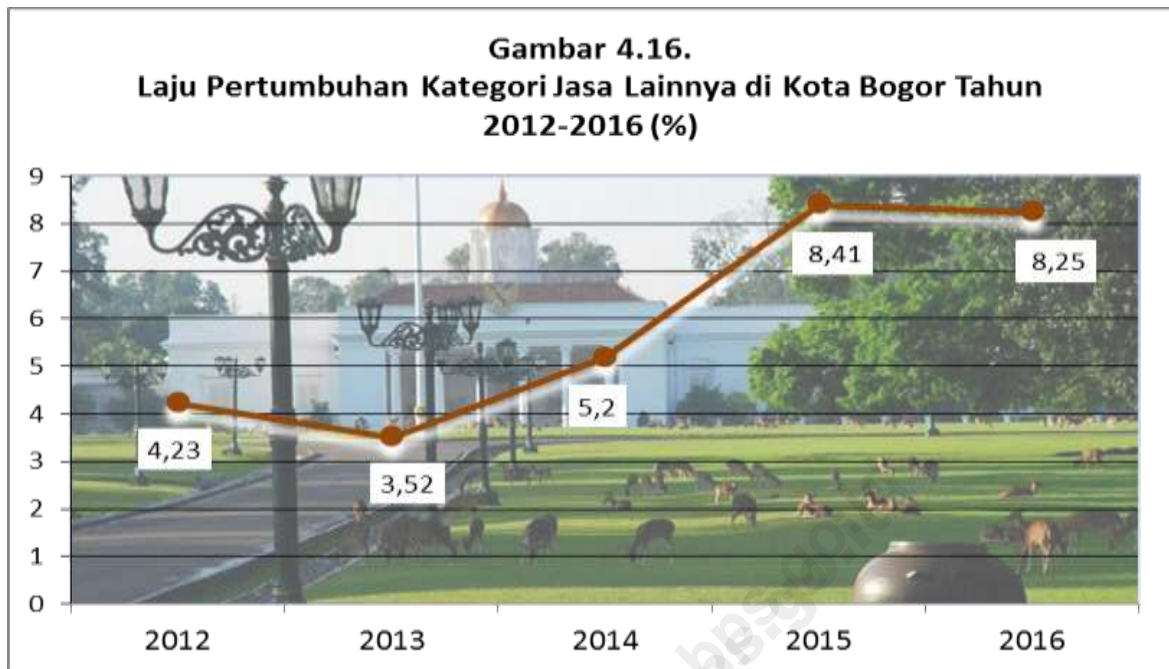


Sumber : BPS Kota Bogor, 2017

4.17. Kategori Jasa Lainnya (Kategori R,S,T,U)

Kontribusi Kategori Jasa Lainnya (R,S,T,U) memiliki cakupan yang cukup luas meliputi kesenian, hiburan, dan rekreasi; jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga. Selain itu tercakup juga jasa perorangan yang melayani rumah tangga serta jasa swasta lainnya, termasuk kegiatan Badan Internasional seperti PBB, IMF dan sebagainya. Pada tahun 2016 PDRB kategori ini sebesar 1,05 Triliyun Rupiah atau memberikan kontribusi sebesar 2,97 persen. Jika ditinjau dari

pertumbuhannya maka jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2015 maka pada 2016 kategori ini tumbuh sedikit melambat pada level 8,25 persen.



Sumber : BPS Kota Bogor, 016

Lampiran

<http://beberkotasib.go.id>

Tabel 1.

PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
Tahun 2012-2016

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	221.051,69	231.430,61	241.575,71	253.951,95	269.243,76
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	4.472.511,44	4.837.978,73	5.393.074,47	5.998.600,60	6.538.497,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.267.307,38	1.514.730,25	1.960.761,41	1.925.046,85	1.970.649,85
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang	24.469,56	27.431,17	28.821,37	31.953,59	36.037,10
F	Konstruksi	2.620.430,97	2.964.539,77	3.280.102,82	3.647.802,34	3.937.651,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.290.523,34	5.927.802,78	6.476.574,46	7.088.063,38	7.643.843,99
H	Transportasi dan Pergudangan	2.549.233,55	2.894.270,97	3.151.053,52	3.776.163,74	4.210.072,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.014.412,50	1.170.326,11	1.294.452,08	1.421.383,40	1.586.007,85
J	Informasi dan Komunikasi	1.001.661,83	1.085.808,51	1.284.855,52	1.521.416,21	1.710.356,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.523.198,13	1.805.303,28	1.975.033,74	2.145.643,26	2.475.163,85
L	Real Estat	510.487,49	580.016,40	653.307,73	716.268,71	782.754,92
M, N	Jasa Perusahaan	471.293,84	533.352,85	593.665,21	675.244,69	746.138,04
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	746.018,69	787.881,00	880.975,97	955.878,40	1.019.031,66
P	Jasa Pendidikan	576.118,91	685.786,74	798.190,62	907.452,16	997.674,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	245.706,73	269.763,21	318.087,37	374.124,90	425.778,60
R, S, T, U	Jasa Lainnya	720.443,42	765.906,80	816.656,40	925.906,78	1.051.908,75
PDRB Total		23.254.869,5	26.082.329,2	29.147.188,4	32.364.901,0	35.400.811,3

Catatan : *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.

PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
Tahun 2012-2016

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	211.810,94	216.320,33	220.689,88	225.137,69	230.145,03
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	4.131.797,48	4.325.575,49	4.564.569,82	4.843.786,77	5.109.363,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	929.961,59	980.512,23	1.025.049,18	898.231,83	903.130,58
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang	22.270,23	23.920,45	25.940,03	27.361,22	28.518,60
F	Konstruksi	2.423.813,84	2.555.955,98	2.696.289,52	2.848.754,78	3.011.149,21
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.825.488,12	5.114.427,17	5.367.108,86	5.650.090,63	5.972.855,53
H	Transportasi dan Pergudangan	2.376.810,85	2.496.952,36	2.637.721,22	2.893.357,49	3.133.215,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	946.037,32	1.002.846,67	1.059.403,07	1.119.753,25	1.209.844,24
J	Informasi dan Komunikasi	978.427,51	1.070.494,44	1.270.614,21	1.506.674,81	1.692.958,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.396.047,71	1.549.250,42	1.606.764,74	1.676.548,86	1.847.070,71
L	Real Estat	457.952,52	490.879,30	525.977,17	555.976,80	601.018,99
M, N	Jasa Perusahaan	417.284,07	456.796,50	477.357,37	516.834,82	560.209,59
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	618.461,78	626.872,86	643.234,24	660.730,22	675.927,01
P	Jasa Pendidikan	524.150,97	587.388,87	656.814,29	718.858,00	772.597,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	228.926,00	246.968,00	279.823,32	313.143,35	341.269,24
R, S, T, U	Jasa Lainnya	714.328,71	739.506,47	777.953,83	843.363,78	912.977,72
PDRB Total		21.203.569,6	22.484.667,5	23.835.310,8	25.298.604,3	27.002.251,5

Catatan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 3.

Distribusi Persentase PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2012-2016

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,95	0,89	0,83	0,78	0,76
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	19,23	18,55	18,50	18,53	18,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,45	5,81	6,73	5,95	5,57
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10
F	Konstruksi	11,27	11,37	11,25	11,27	11,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,75	22,73	22,22	21,90	21,59
H	Transportasi dan Pergudangan	10,96	11,10	10,81	11,67	11,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,36	4,49	4,44	4,39	4,48
J	Informasi dan Komunikasi	4,31	4,16	4,41	4,70	4,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,55	6,92	6,78	6,63	6,99
L	Real Estat	2,20	2,22	2,24	2,21	2,21
M, N	Jasa Perusahaan	2,03	2,04	2,04	2,09	2,11
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,21	3,02	3,02	2,95	2,88
P	Jasa Pendidikan	2,48	2,63	2,74	2,80	2,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,06	1,03	1,09	1,16	1,20
R, S, T, U	Jasa Lainnya	3,10	2,94	2,80	2,86	2,97
PDRB Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Bogor, 2017

Catatan : *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 4.

Distribusi Persentase PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2012-2016

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,00	0,96	0,93	0,89	0,85
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	19,49	19,24	19,15	19,15	18,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,39	4,36	4,30	3,55	3,34
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
F	Konstruksi	11,43	11,37	11,31	11,26	11,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,76	22,75	22,52	22,33	22,12
H	Transportasi dan Pergudangan	11,21	11,11	11,07	11,44	11,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,46	4,46	4,44	4,43	4,48
J	Informasi dan Komunikasi	4,61	4,76	5,33	5,96	6,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,58	6,89	6,74	6,63	6,84
L	Real Estat	2,16	2,18	2,21	2,20	2,23
M, N	Jasa Perusahaan	1,97	2,03	2,00	2,04	2,07
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,92	2,79	2,70	2,61	2,50
P	Jasa Pendidikan	2,47	2,61	2,76	2,84	2,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,08	1,10	1,17	1,24	1,26
R, S, T, U	Jasa Lainnya	3,37	3,29	3,26	3,33	3,38
PDRB Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Bogor, 2017

Catatan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 5.

Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2012-2016

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,48	4,70	4,38	5,12	6,02
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	7,95	8,17	11,47	11,23	9,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	25,31	19,52	29,45	-1,82	2,37
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang	13,27	12,10	5,07	10,87	12,78
F	Konstruksi	12,78	13,13	10,64	11,21	7,95
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,08	12,05	9,26	9,44	7,84
H	Transportasi dan Pergudangan	13,71	13,53	8,87	19,84	11,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,29	15,37	10,61	9,81	11,58
J	Informasi dan Komunikasi	12,26	8,40	18,33	18,41	12,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,30	18,52	9,40	8,64	15,36
L	Real Estat	13,71	13,62	12,64	9,64	9,28
M, N	Jasa Perusahaan	12,81	13,17	11,31	13,74	10,50
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,01	5,61	11,82	8,50	6,61
P	Jasa Pendidikan	19,27	19,04	16,39	13,69	9,94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,72	9,79	17,91	17,62	13,81
R, S, T, U	Jasa Lainnya	5,27	6,31	6,63	13,38	13,61
PDRB Total		11,98	12,16	11,75	11,04	9,38

Sumber : BPS Kota Bogor, 2017

Catatan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 6.

Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2012-2016

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,52	2,13	2,02	2,02	2,22
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	3,11	4,69	5,53	6,12	5,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,63	5,44	4,54	(12,37)	0,55
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang	6,78	7,41	8,44	5,48	4,23
F	Konstruksi	7,62	5,45	5,49	5,65	5,70
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,36	5,99	4,94	5,27	5,71
H	Transportasi dan Pergudangan	10,18	5,05	5,64	9,69	8,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,83	6,00	5,64	5,70	8,05
J	Informasi dan Komunikasi	10,48	9,41	18,69	18,58	12,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,06	10,97	3,71	4,34	10,17
L	Real Estat	7,13	7,19	7,15	5,70	8,10
M, N	Jasa Perusahaan	6,08	9,47	4,50	8,27	8,39
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,98	1,36	2,61	2,72	2,30
P	Jasa Pendidikan	13,88	12,06	11,82	9,45	7,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,05	7,88	13,30	11,91	8,98
R, S, T, U	Jasa Lainnya	4,23	3,52	5,20	8,41	8,25
PDRB Total		6,31	6,04	6,01	6,14	6,73

Sumber : BPS Kota Bogor, 2017

Catatan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 7.

Indeks Perkembangan PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2012-2016

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	109,98	115,15	120,19	126,35	133,96
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	117,00	126,56	141,08	156,92	171,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	140,94	168,45	218,06	214,09	219,16
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang	127,72	143,18	150,43	166,78	188,10
F	Konstruksi	122,52	138,61	153,36	170,55	184,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	125,21	140,30	153,28	167,76	180,91
H	Transportasi dan Pergudangan	125,88	142,92	155,59	186,46	207,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	122,19	140,97	155,92	171,21	191,04
J	Informasi dan Komunikasi	131,83	142,90	169,10	200,23	225,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	123,02	145,81	159,52	173,30	199,91
L	Real Estat	128,20	145,66	164,06	179,87	196,57
M, N	Jasa Perusahaan	134,75	152,50	169,74	193,07	213,34
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	127,26	134,40	150,28	163,06	173,83
P	Jasa Pendidikan	131,48	156,51	182,16	207,09	227,68
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	117,52	129,02	152,14	178,94	203,64
R, S, T, U	Jasa Lainnya	113,50	120,66	128,65	145,86	165,71
PDRB Total		123,86	138,92	155,24	172,38	188,55

Sumber : BPS Kota Bogor, 2017

Catatan : *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 8.

Indeks Perkembangan PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2012-2016

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	105,38	107,63	109,80	112,02	114,51
B	Pertambangan dan Penggalian		-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	108,09	113,16	119,41	126,71	133,66
D	Pengadaan Listrik dan Gas	103,42	109,04	114,00	99,98	100,44
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang	116,24	124,85	135,40	142,81	148,85
F	Konstruksi	113,32	119,50	126,06	133,19	140,78
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	114,21	121,05	127,03	133,72	141,36
H	Transportasi dan Pergudangan	117,36	123,30	130,25	142,87	154,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	113,95	120,80	127,61	134,88	145,73
J	Informasi dan Komunikasi	128,77	140,89	167,22	198,29	222,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	112,76	125,13	129,77	135,41	149,18
L	Real Estat	115,00	123,27	132,09	139,62	150,93
M, N	Jasa Perusahaan	119,31	130,61	136,49	147,77	160,18
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	105,50	106,94	109,73	112,71	115,30
P	Jasa Pendidikan	119,62	134,05	149,89	164,05	176,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	109,49	118,12	133,84	149,77	163,22
R, S, T, U	Jasa Lainnya	112,53	116,50	122,56	132,86	143,83
PDRB Total		112,93	119,75	126,95	134,74	143,82

Sumber : BPS Kota Bogor, 2017

Catatan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 9.

Indeks Implisit PDRB Kota Bogor Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	104,36	106,99	109,46	112,80	116,99
B	Pertambangan dan Penggalian					
C	Industri Pengolahan	108,25	111,85	118,15	123,84	127,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	136,28	154,48	191,28	214,32	218,20
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang	109,88	114,68	111,11	116,78	126,36
F	Konstruksi	108,11	115,99	121,65	128,05	130,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	109,64	115,90	120,67	125,45	127,98
H	Transportasi dan Pergudangan	107,25	115,91	119,46	130,51	134,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	107,23	116,70	122,19	126,94	131,09
J	Informasi dan Komunikasi	102,37	101,43	101,12	100,98	101,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	109,11	116,53	122,92	127,98	134,00
L	Real Estat	111,47	118,16	124,21	128,83	130,24
M, N	Jasa Perusahaan	112,94	116,76	124,36	130,65	133,19
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	120,62	125,68	136,96	144,67	150,76
P	Jasa Pendidikan	109,91	116,75	121,52	126,24	129,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	107,33	109,23	113,67	119,47	124,76
R, S, T, U	Jasa Lainnya	100,86	103,57	104,97	109,79	115,22
PDRB Total		109,67	116,00	122,29	127,93	131,10

Sumber : BPS Kota Bogor, 2017

Catatan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 10.

Laju Implisit PDRB Kota Bogor Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,91	2,51	2,32	3,05	3,71
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	4,69	3,33	5,64	4,82	3,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18,63	13,36	23,82	12,04	1,81
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang	6,07	4,37	(3,11)	5,11	8,20
F	Konstruksi	4,79	7,28	4,89	5,26	2,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,38	5,72	4,11	3,96	2,01
H	Transportasi dan Pergudangan	3,20	8,07	3,06	9,25	2,96
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,16	8,83	4,70	3,89	3,27
J	Informasi dan Komunikasi	1,60	(0,92)	(0,31)	(0,14)	0,05
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,93	6,80	5,49	4,12	4,71
L	Real Estat	6,14	6,00	5,12	3,72	1,09
M, N	Jasa Perusahaan	6,34	3,38	6,51	5,05	1,94
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,74	4,19	8,97	5,63	4,21
P	Jasa Pendidikan	4,74	6,22	4,09	3,88	2,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,49	1,77	4,07	5,10	4,43
R, S, T, U	Jasa Lainnya	1,00	2,69	1,36	4,58	4,95
PDRB Total		5,33	5,77	5,42	4,62	2,48

Sumber : BPS Kota Bogor, 2017

Catatan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BOGOR**

Jl. Layungsari III No 13 Bogor 16132
Telp (0251) 8324579 Fax. (0251) 8327641
Email : bps3271@mailhost.bps.go.id